

**IMPLEMENTASI PROGRAM SIDUKUN 3 IN 1 DALAM
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DKI JAKARTA**

Disusun Oleh:

NAMA : FADTHELAND MUSTOFA ABDUL GHANI PUTRA
UTAMA
NPM : 1962002011
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.AP)



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2023**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Fadtheland Mustofa Abdul Ghani Putra Utama
NPM : 1962002011
Jurusan : Administrasi Publik
: Administrasi Pembangunan Negara

Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Implementasi Program SIDUKUN 3 in 1 Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : *Implementation of SIDUKUN 3 in 1 Programme in Improving The Quality of Public Services at The DKI Jakarta Provincial Population and Civil Registration Office*

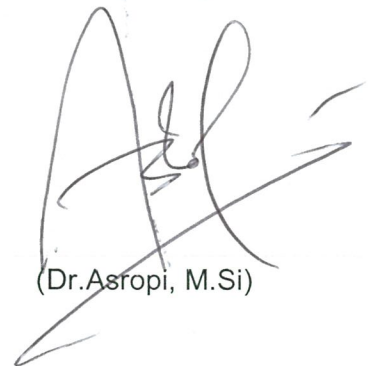
Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis.

Pembimbing I



(Yogi Suwarno, MA.,PhD)

Pembimbing II



(Dr.Asropi, M.Si)

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : FADTHELAND MUSTOFA ABDUL GHANI PUTRA
UTAMA
NPM : 1962002011
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINITRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH
JUDUL TESIS : IMPLEMENTASI PROGRAM SIDUKUN 3 IN 1 DALAM
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPII PROVINSI DKI JAKARTA

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister
Terapan Admnistrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta,
Lembaga Administrasi Negara, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 4 Juli 2023
Pukul : 09:00 Wib

TELAH DIINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA
Sekretaris : Dr. Edy Sutrisno, S.E., M.St
Anggota : Dr. Bambang Giyanto, S.H.,
M.Pd.
Pembimbing 1 : Yogi Suwarno, MA.,Ph.D
Pembimbing 2 : Dr. Asropi, S.Ip.,M.S.i



The image shows the official stamp of Politeknik STIA LAN Jakarta, which is a circular seal with the institution's name and logo. Overlaid on the stamp are three handwritten signatures in black ink, representing the members of the thesis defense committee.

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fadtheland Mustofa Abdul Ghani Putra Utama

NPM : 1962002011

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul “Implementasi Program Sidukun 3 in 1 Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta” secara keseluruhan adalah hasil kajian dan karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dirujuk maupun yang tidak dirujuk telah penulis nyatakan dengan benar.

Jakarta, Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Fadtheland Mustofa A.G.P.U

ABSTRAK

Implementasi Program Sidukun 3 in 1 Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Dki Jakarta

Fadtheland Mustofa Abdul Ghani Putra Utama, Yogi Suwarno, Asropi
fadtheland.mustofa69@gmail.com
Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui hal hal apa saja yang menjadi prasyarat berhasilnya implementasi Program Si Dukun 3 in 1 serta untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat utama keberhasilan implementasi kebijakan inovasi Si dukun 3 in 1. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan telaah Dokumen. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi Si Dukun 3 in 1 ini sudah berjalan dengan baik dalam meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi ibu dan bayi yang baru dilahirkan, namun masih ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya, untuk mengetahui dan menganalisa faktor apa saja itu, peneliti menggunakan metode Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, inovasi, Si Dukun 3 in 1

ABSTRACT

Implementation of SIDUKUN 3 in 1 Programme in Improving The Quality of Public Services at The DKI Jakarta Provincial Population and Civil Registration Office

Fadtheland Mustofa Abdul Ghani Putra Utama, Yogi Suwarno, Asropi
fadtheland.mustofa69@gmail.com
Politeknik of STIA LAN Jakarta

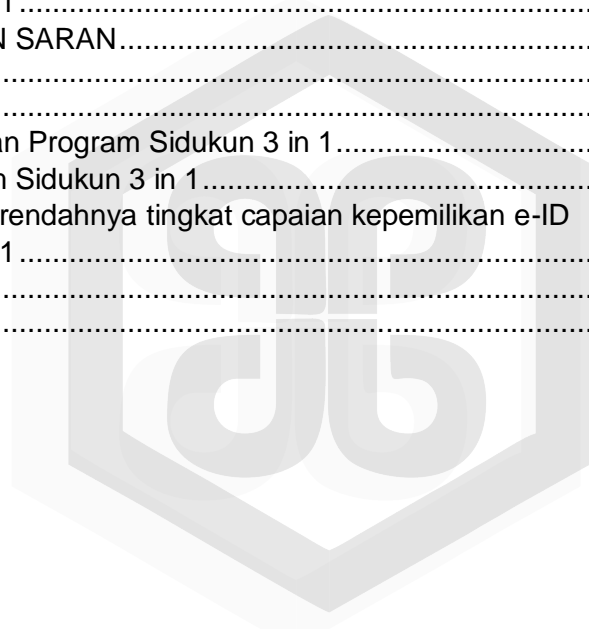
This research aims to analyze and know what things are the prerequisites for the successful implementation of the Si Dukun 3 in 1 Program and to know what factors may be the main obstacle to the success of implementing the innovation policy of Si dukun 3 in 1. The research method used is descriptive qualitative research method. Data collection was carried out through interviews, observations and review of the document. the results of this research showed that this 3 in 1 innovation has gone well in increasing the coverage of ownership of document positions for mothers and newborn babies, but still found some obstacles in its application, to know and analyze what factors it is, the researchers used the George C Model Policy Implementation method. Edward III.

Keywords: Implementation of policy, innovation, Si Dukun 3 in 1

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR DIAGRAM	xii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Permasalahan	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
1. Secara Teoritis	8
2. Secara Praktis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis.....	15
1. Tinjauan Kebijakan	15
2. Tinjauan Teoritis.....	19
C. Implementasi Program SIDUKUN 3 in 1 dalam meningkatkan kualitas Pelayanan Publik 43	
D. Kerangka Berpikir	44
1. Struktur Birokrasi.....	44
2. Disposisi.....	45
3. Komunikasi	45
4. Sumber daya.....	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	47
A. Metode Penelitian	47
B. Teknik Pengumpulan Data.....	48
C. Teknik Pengolahan dan Analisa Data	50
D. Instrumen Penelitian	54
BAB IV LAPORAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
1. Deskripsi Lokasi Penelitian	57
2. Gambaran Umum Kota Jakarta.....	57
3. Demografi	59
4. Gambaran Umum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	59
5. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi	60
6. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	64
7. Telaah Visi, Misi dan Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025	66
8. Telaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)	67
9. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	71

B.	Hasil dan Pembahasan	72
1.	Implementasi Program Sidukun 3 in 1.....	72
2.	Standar pelayanan Program Sidukun 3 in 1 sebagai tolak ukur Kualitas pelayanan publik.....	77
3.	Outcomes program Sidukun 3 in 1.....	82
4.	Faktor penyebab rendahnya tingkat capaian kepemilikan e-ID BPJS dalam program Sidukun 3 in 1.....	97
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		101
A.	KESIMPULAN	101
1.	Implementasi	101
2.	Standar Pelayanan Program Sidukun 3 in 1.....	101
3.	Outcome program Sidukun 3 in 1.....	103
4.	Faktor penyebab rendahnya tingkat capaian kepemilikan e-ID BPJS dalam program Sidukun 3 in 1.....	104
B.	SARAN.....	107
Daftar Pustaka		109



POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Pelayanan SIDUKUN 3 in 1 pada Rumah Sakit/Klinik Swasta/Pmb periode Januari-Desember 2019.....	4
Tabel 1.2 Rekapitulasi Pelayanan SIDUKUN 3 in 1 pada Rumah Sakit/Klinik Swasta/Pmb periode Januari-Desember 2020	4
Tabel 2.1 Rangkuman Penelitian Terdahulu Terkait Collaborative Governance	11
Tabel 2.2 Tujuan Kolaborasi berdasarkan Stakeholder	16
Tabel 3.1 Jumlah Informan pada Penelitian	49
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Status 31 Desember 2022.....	59
Tabel 4.2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Kebijakan Renstra	65
Tabel 4.3 Target dan Indikator SDGs dari Tujuan 1, 16, and 17	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kondisi Sebelum diimplementasikan Program SIDUKUN 3 in 1.....	2
Gambar 1.2 Alur Proses Pelayanan Aplikasi SIDUKUN 3 in 1 Bagi Warga yang melahirkan di RSUD.....	3
Gambar 4.1 Gambaran Umum Kota Jakarta	58
Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas.....	63
Gambar 4.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TBP/SDGs).....	68



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Rekapitulasi Pelayanan SIDUKUN 3 in 1 pada Rumah Sakit/Klinik Swasta/Pmb periode Jan-Des 2020	5
--	---



**POLITEKNIK
STIA LAN**
J A K A R T A
J A K A R T A

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1 Dampak Langsung dan Tidak Langsung Dalam Implementasi.....	25
Diagram 2.2 Kerangka Berpikir Penelitian.....	44



**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA
JAKARTA**

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Masalah

SIDUKUN 3 in 1 merupakan akronim dari Sistem Integrasi Layanan Kependudukan tiga instansi dalam satu loket layanan (RSUD/RS/Bidan Mandiri, Dukcapil dan BPJS). Dalam membangun sistem layanan yang terintegrasi pastinya membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak yang terlibat. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta telah berupaya dengan suatu kolaborasi yaitu Program SIDUKUN 3 in 1 yang merupakan suatu kebijakan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik berupa peningkatan nilai manfaat (*outcome*) dari NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan dokumen kependudukan lainnya sebagai dasar penerbitan e-ID BPJS guna meraih kesejahteraan ibu dan bayi yang baru dilahirkan, dalam proses pembiayaan persalinan di rumah sakit.

Menurut Edwards III (1980: 1), studi tentang implementasi kebijakan sangat penting untuk administrasi publik dan kebijakan publik. Tahap implementasi kebijakan terjadi antara pembentukan kebijakan dan dampak kebijakan pada masyarakat yang terkena dampak.

Begitu juga dengan implementasi kebijakan Program SIDUKUN 3 in 1 yang merupakan salah satu Program unggulan dari Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta dan menjadi salah satu nominator yang masuk dalam top 99 ajang kolaborasi sinovik Kemenpan pada tahun 2017 ini, pada dasarnya bertujuan untuk menyederhanakan pola pelayanan administrasi kependudukan mulai dari input, proses, output hingga outcome berupa pemanfaatan hasil dari pelayanan itu sendiri. Karena selama ini sebelum kebijakan Program SIDUKUN 3 in 1 diimplementasikan, pelayanan administrasi kependudukan terutama bagi bayi dan ibu yang baru melahirkan seringkali menghadapi kendala dalam hal mengurus pendaftaran penduduk untuk mendapatkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) bagi bayi, yang merupakan persyaratan utama dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan kesehatan yaitu BPJS. Pada saat itu pola pelayanannya masih sangat konvensional yang mana harus melalui berbagai macam loket pelayanan, dimana bayi dan ibu yang baru melahirkan setelah menyelesaikan administrasi persalinan di rumah sakit bersalin harus datang ke loket pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta tingkat kelurahan untuk memproses permohonan NIK (Nomor Induk Kependudukan), surat keterangan pelaporan kelahiran, akta kelahiran dan KK yang menjadi persyaratan utama untuk mendaftarkan diri dalam kepesertaan BPJS.

Kondisi sebelum diimplementasikannya Program SIDUKUN 3 in 1, seperti terlihat pada **Gambar 1.1.** berikut ini:

Sebelum ada Aplikasi SIDUKUN 3 in 1
Gambar 1.1 Kondisi Sebelum diimplementasikan Program SIDUKUN 3 in 1

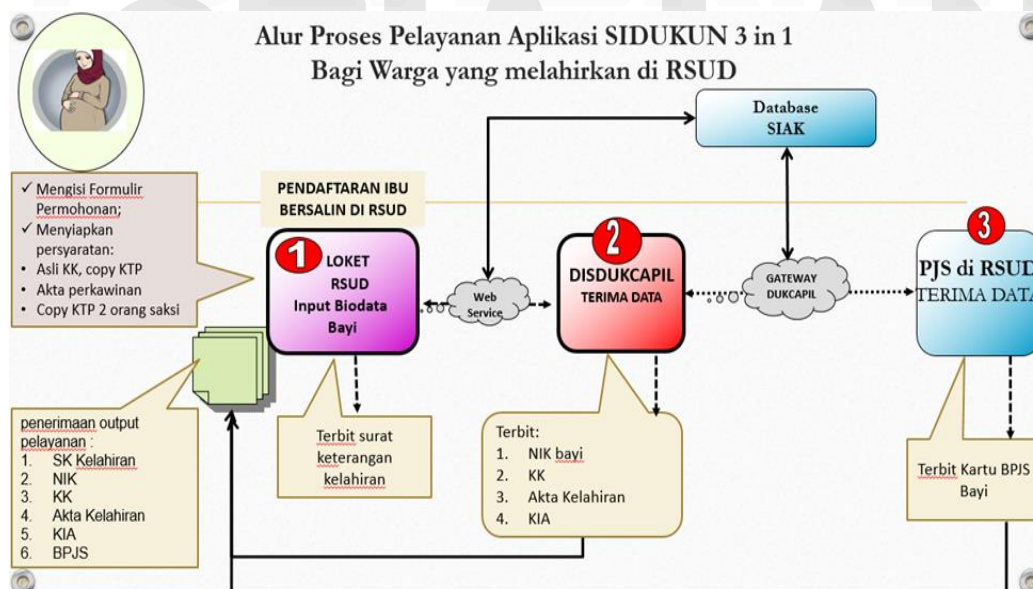


sumber: youTube info grafis #dukcapilinfo

Terlihat seperti gambar diatas, dimana proses pelayanan tersebut masih sangatlah tidak efisien, warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan administrasi Kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta administrasi pembiayaan jaminan kesehatan masih harus melalui masing-masing loket pelayanan yang terpisah yang memiliki persyaratan berbeda pada setiap instansi masing-masing. Sehingga hal ini menyebabkan inefisiensi dalam waktu penyelesaian dari suatu output pelayanan berupa surat keterangan kelahiran dari fasilitas Kesehatan, dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dari Dinas Dukcapil serta e-ID kepesertaan jaminan Kesehatan dari BPJS Kesehatan. Untuk waktu penyelesaian dokumen kependudukannya saja pada saat itu membutuhkan waktu penyelesaian kurang lebih 14 hari kerja belum lagi ditambah waktu untuk mengurus BPJS, sangat memakan waktu dan membutuhkan energi ekstra pastinya. Dalam rangka penyederhanaan proses birokrasi pelayanan tersebut, maka Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta berinisiatif untuk melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap fokus pelayanan yang sama, yaitu antara rumah sakit sebagai loket awal persalinan, Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta sebagai instansi yang memproses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi bayi yang baru dilahirkan dan BPJS sebagai instansi yang memanfaatkan hasil dari layanan administrasi kependudukan berupa KK dan NIK bayi sebagai dasar untuk pendaftaran kepesertaan atau e-ID BPJS dalam pelayanan pembiayaan kesehatan. Dari uraian tugas dan fungsi masing-masing instansi dapat dilihat hubungan saling

ketergantungan dan keterkaitan satu sama lain, sehingga perlu dilaksanakan suatu kerjasama dengan membangun pola pelayanan publik atas kesepakatan bersama. Selanjutnya pola kerjasama ini dibakukan dalam suatu Program pelayanan yaitu Program SIDUKUN 3 in 1, dimana proses pelayanan di tiga instansi ini dikemas dalam satu Program yang terintegrasi dan sangat sederhana polanya, bagi bayi dan ibu yang baru melahirkan sudah tidak lagi direpotkan untuk mendaftarkan bayi dan melaporkan peristiwa kelahirannya melalui loket pelayanan yang ada di Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta tingkat kelurahan, namun cukup mendaftarkan diri pada loket persalinan yang ada di rumah sakit yang telah bekerjasama. Alur layanannya sudah sangat sederhana yaitu pada saat yang bersangkutan akan melangsungkan persalinan, data dan berkas persyaratan yang diinput di loket persalinan secara online terinput ke dalam Program SIDUKUN 3 in 1 melalui web service sehingga dapat segera diproses pelaporan kelahirannya untuk mendapatkan NIK bayi dalam Kartu Keluarga yang sudah terupdate yang dilanjutkan secara online untuk pendaftaran kepesertaan e-ID BPJS Kesehatan, sehingga ketika ibu dan bayi telah selesai proses persalinannya maka selesai pula proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipilnya berupa dokumen Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan KIA, begitu pula dengan kepesertaan e-ID BPJS kesehatannya. Adapun alur proses pelayanannya seperti terlihat pada **Gambar 1.2**. berikut:

Gambar 1.2 Alur Proses Pelayanan Aplikasi SIDUKUN 3 in 1 Bagi Warga yang melahirkan di RSUD



sumber: youTube info grafis #dukcapilinfo

Setelah Program SIDUKUN 3 in 1 ini dijalankan, secara statistik pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sejak tahun 2019 hingga Desember 2020

tercatat peningkatan pelayanan yang sangat signifikan, namun seiring dengan hal tersebut justru capaian kepemilikan e-ID kepesertaan BPJS semakin menurun, e-ID BPJS yang dimaksud dalam hal ini adalah kartu kepesertaan BPJS secara elektronik yang dihasilkan atau output dari hasil integrasi dengan database kependudukan dalam program sidukun 3 in 1 ini secara real time. Hal ini dapat dilihat pada tabel rekapitulasi pelayanan SIDUKUN 3 in 1 periode Januari-Desember 2019 yang dibandingkan dengan capaian kepemilikan e-ID BPJS pada tahun selanjutnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rekapitulasi Pelayanan SIDUKUN 3 in 1 pada Rumah Sakit/Klinik Swasta/Pmb periode Januari-Desember 2019

NO	RumahSakit/Puskesmas	Akta	KIA	KK	BPJS
1	2	3	4	5	6
1	PUSKESMAS KELURAHAN	265	265	265	26
2	PUSKESMAS KECAMATAN	5078	5078	5078	671
3	RSUD/RSUP	12526	12526	12526	5453
4	RUMAH SAKIT/KLINIK SWASTA/PMB	7931	7931	7931	698
Total Keseluruhan		25803	25803	25803	6854
Total Seluruh Pelayanan		84263			

Sumber: BDI Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta

Kemudian pada tahun berikutnya, berdasarkan data awal yang diperoleh dari Bidang Data dan Informasi (BDI) Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, terlihat adanya peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan berupa akta kelahiran, KIA dan KK yang sangat signifikan namun justru kepemilikan e-ID BPJS mengalami penurunan jumlah capaian, dari jumlah 6854 pada tahun 2019 menjadi 824 pada tahun 2020. Dan jumlah keseluruhan capaian e-ID BPJS masih jauh lebih rendah tidak berbanding lurus dengan kepemilikan akta kelahiran, KIA dan KK. seperti terlihat pada **Tabel 1.2.** berikut ini:

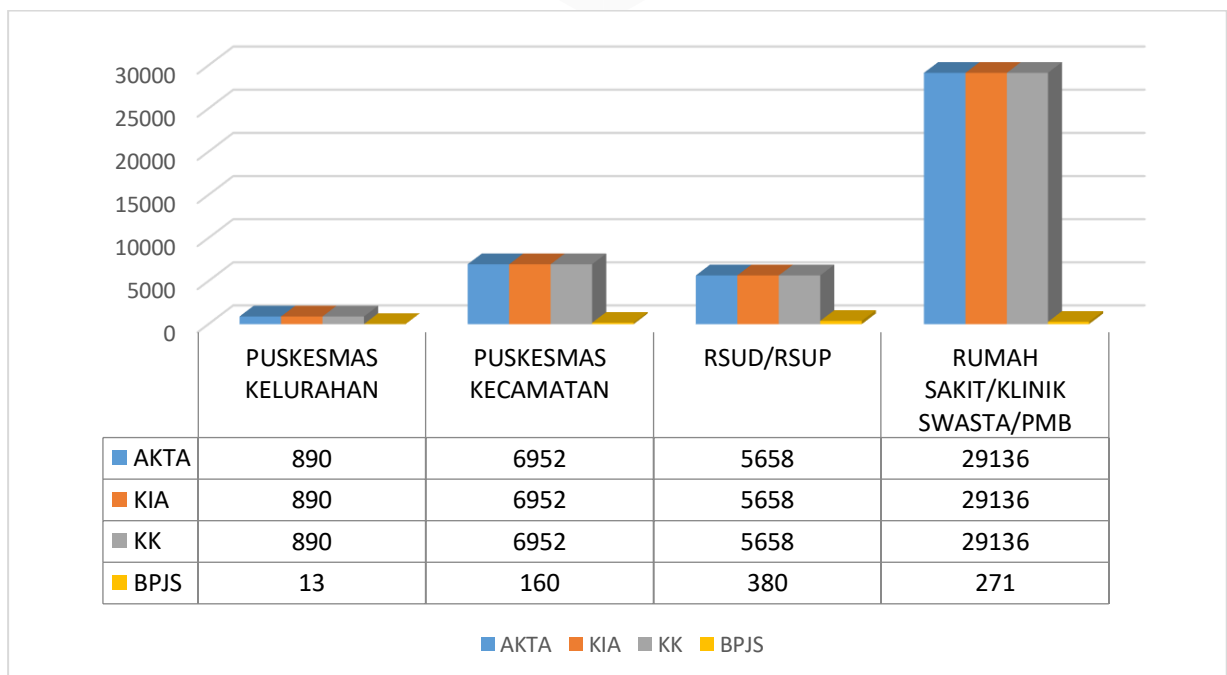
Tabel 1.2 Rekapitulasi Pelayanan SIDUKUN 3 in 1 pada Rumah Sakit/Klinik Swasta/Pmb periode Januari-Desember 2020

NO	RumahSakit/Puskesmas	Akta	KIA	KK	BPJS
1	2	3	4	5	6

1	PUSKESMAS KELURAHAN	890	890	890	13
2	PUSKESMAS KECAMATAN	6952	6952	6952	160
3	RSUD/RSUP	5658	5658	5658	380
4	RUMAH SAKIT/KLINIK SWASTA/PMB	29136	29136	29136	271
Total Keseluruhan		42636	42636	42636	824
Total Seluruh Pelayanan		128732			

Sumber:BDI DisdukcapilProvinsi DKI Jakarta

Dapat dijelaskan dari **Tabel 1.2.** diatas, seharusnya ketika terjadi peningkatan pelayanan persalinan yang diikuti dengan peningkatan kepemilikan dokumen kepedudukan juga harus berbanding lurus dengan peningkatan kepemilikan e-ID BPJS karena sesuai dengan Perpres No 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan pasal 6 ayat 1 kepesertaan jaminan Kesehatan bersifat wajib, yang mana NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai key access dalam penerbitan ID BPJS malah justeru dari tahun ke tahun semakin menurun, atau dalam kata lain terdapat fenomena masih rendahnya tingkat penggunaan NIK sebagai akses kunci penerbitan e ID BPJS seperti digambarkan pada **Grafik 1.1** berikut:



Grafik 1.1 Rekapitulasi Pelayanan SIDUKUN 3 in 1 pada Rumah Sakit/Klinik Swasta/Pmb periode Jan-Des 2020

Dan bila hal ini merujuk pada lembar perjanjian kerjasama (PKS) antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Divisi Regional IV tentang Pemanfaatan Data Penduduk Dalam Verifikasi Biodata Penduduk Provinsi DKI Jakarta Pada Pelayanan Administrasi Kepesertaan Jaminan

Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan Divisi Regional IV Nomor : 05 tahun 2016 Nomor :01/KTR/Divre-IV/0116, dimana masing-masing pihak telah bersepakat menyatakan pemanfaatan data base kependudukan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan, yang termasuk didalamnya terkait hal penyaluran dana bantuan Program Kartu Jakarta Sehat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada penduduk DKI Jakarta yang dilakukan melalui BPJS Divisi Regional IV dengan menggunakan Kartu Keluarga/ Kartu Tanda Penduduk sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan bantuan tersebut dan adanya kewajiban (mandatory) dalam kepersertaan Jaminan Kesehatan berdasarkan Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mencakup seluruh penduduk Indonesia dengan bukti berupa Kartu keluarga, KTP elektronik, data kependudukan dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam rangka perbaikan data kepersertaan, registrasi kepersertaan, validasi dan verifikasi, pembaharuan data kepersertaan dan perencanaan jaminan kesehatan bagi penduduk yang belum dan sudah terdaftar dalam Program Jaminan Sosial BPJS kesehatan. Untuk itu diperlukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai kunci akses agar terjadinya integrasi data kepesertaan jaminan Kesehatan dengan data kependudukan. Dalam perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peran masing-masing pihak yang terlibat dalam kolaborasi, dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi seluruh penduduk dengan memanfaatkan Kartu Keluarga, KTP elektronik dan data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang juga merupakan *outcomes* yang diharapkan, selain itu kolaborasi yang dibangun melalui program Si dukun 3 in 1 ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas sinkronisasi data melalui mekanisme verifikasi dan validasi data dengan pemanfaatan data kependudukan oleh BPJS dalam rangka mencegah duplikasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan non Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) sehingga tercapai tujuan BPJS kesehatan dalam mencapai ketunggalan nomor kepesertaan dalam sistem jaminan sosial nasional.

Berdasarkan penjelasan diatas, seharusnya tingkat capaian kepemilikan e ID BPJS adalah sama jumlahnya dengan tingkat capaian surat keterangan lahir dari rumah sakit, NIK ,akta kelahiran , KIA dan KK dari Dinas Dukcapil. Masih lebih rendahnya tingkat kepemilikan e-ID BPJS sebagai hasil dari proses Program Sidukun 3 in 1 ini setidaknya dapat menggambarkan berhasil atau tidaknya program Sidukun 3 in 1 ini dalam pelaksanaannya, sehingga perlu diketahui faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dan menjadi faktor penghambat utama yang menyebabkan tingkat capaian kepemilikan e-ID BPJS masih rendah dalam Program Sidukun 3 in 1.

B. Identifikasi Masalah

Hal ini cukup menarik untuk diteliti bila dilihat dari perspektif studi implementasi kebijakan, terkait dengan:

1. Ada kendala secara teknis dan kebijakan terkait implementasi program Sidukun 3 in 1
2. Kualitas pelayanan publik pada program Sidukun 3 in 1 belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan
3. Adanya ketidaksesuaian outcome yang didapat oleh BPJS dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama
4. Tingkat capaian kepemilikan e-ID kepesertaan BPJS bagi bayi yang baru lahir yang masih cukup rendah dan tidak sebanding lurus dengan peningkatan pelayanan persalinan dan pelayanan dokumen kependudukan pada loket pelayanan yang sudah terintegrasi dengan Program SIDUKUN 3 in 1

Untuk itulah perlu dilaksanakan kegiatan penelitian ini agar mendapatkan jawaban dan rasa keingintahuan pada permasalahan tersebut sehingga dapat memberikan rekomendasi masukan terhadap Program SIDUKUN 3 in 1 agar proses kolaborasi yang dijalankan lebih berhasil guna dalam mencapai target dan tujuan yang telah disepakati secara bersama-sama.

C. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Program Sidukun 3 in 1 pada saat ini?
2. Bagaimana kualitas pelayanan publik pada program Sidukun 3 in 1 saat ini?
3. Bagaimana outcome dari program Sidukun 3 in 1?
4. Faktor apa saja yang menjadi kendala yang menyebabkan tingkat capaian kepemilikan e-ID kepesertaan BPJS dalam program Sidukun 3 in 1 bagi bayi yang baru lahir itu masih cukup rendah tidak sebanding lurus dengan peningkatan pelayanan administrasi persalinan dan administrasi kependudukan di rumah sakit pada Program SIDUKUN 3 in 1?

D. Tujuan Penelitian

Merujuk pada apa yang telah disampaikan pada identifikasi masalah dan rumusan permasalahan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Agar dapat diketahui bagaimana program Sidukun 3 in 1 diimplementasikan

2. Agar dapat diketahui kualitas pelayanan publik pada program Sidukun 3 in 1
3. Agar dapat diketahui bagaimana dengan outcome yang didapat oleh stake holder khususnya BPJS Kesehatan
4. Agar dapat diketahui faktor apa saja yang menjadi kendala penyebab masih rendahnya tingkat capaian kepemilikan e-ID kepesertaan BPJS bagi bayi yang baru lahir bila dibandingkan dengan cakupan pelayanan Kesehatan dan capaian kepemilikan dokumen kependudukan pada Program SIDUKUN 3 in 1.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi perkembangan teori *Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III*

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan kepada para pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi, khususnya kepada Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta sebagai inisiator Program SIDUKUN 3 in 1.